

REKONSTRUKSI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

(Studi Kasus i Kupang)

Oleh: **Muhammad As'ad**

Abstrak

Ketika terjadi konflik dalam masyarakat, agama sering kali dibawa serta sebagai faktor legitimasi penyebab konflik dengan maksud untuk menggalang solidaritas yang lebih besar dari sesama umat. Dalam suasana konflik, agama sering kali menjadi titik singgung paling sensitif dan eksklusif dalam interaksi sosial masyarakat plural. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang penduduknya plural, baik dari segi etnis, budaya, agama, dan lainnya. Kerukunan masyarakatnya sudah terbina sejak dahulu, namun secara kasuistik terjadi peristiwa yang bisa digolongkan konflik bernuansa agama. Kasus paling menonjol adalah pencemaran Hostia Kudus.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa kerusuhan 30 Nopember 1998, mengganggu kerukunan umat beragama di Kota Kupang khususnya, dan NTT umumnya. Pada satu sisi menimbulkan dampak psikologis yang negatif bagi umat Islam, terutama bagi pendatang. Dampak psikologis ini masih memerlukan penanganan yang baik. Namun pada sisi lain, menimbulkan usaha-usaha perbaikan yang hasilnya memperlihatkan terpelihara dan terbinanya kerukunan. Kendala utama dalam upaya peningkatan kegiatan dan program kerja kerukunan adalah masalah dana. Kendala lainnya dalam proses integrasi masyarakat ialah bersifat psikologis dan kultural.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan berbangsa selama ini, kemajemukan telah menciptakan konfigurasi perpaduan yang sangat indah dan menawan dalam berbagai bentuk mozaik budaya. Berbagai macam agama, suku bangsa dengan adat istiadat dan budaya masing-masing, demikian pula perbedaan-

perbedaan lapisan sosial ternyata dapat hidup berdampingan secara damai, bahkan dapat bekerjasama satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari.

Berbagai peristiwa konflik yang menggejolak di sebagian wilayah Indonesia, terutama pasca Orde Baru mengindikasikan bahwa telah terjadi pertentangan berbagai kepentingan di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Dalam pertentangan itu, isu agama, ras, dan antara golongan (SARA) demikian cepat menyebar sehingga tercipta suasana ketegangan dan konflik dalam kehidupan masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa perbedaan dalam masyarakat majemuk, disamping berfungsi sebagai faktor perekat, juga dapat menjadi faktor pengurai integrasi masyarakat

Ketika terjadi konflik dalam masyarakat, agama sering kali dibawa serta sebagai faktor legitimasi penyebab konflik dengan maksud untuk menggagalkan solidaritas yang lebih besar dan luas dari sesama umat. Dalam suasana konflik, agama memang sering kali menjadi titik singgung paling sensitif dan eksklusif dalam interaksi sosial masyarakat plural.

Salah satu peristiwa yang cukup mengejutkan masyarakat NTT, terutama masyarakat Kota Kupang, yaitu terjadinya kerusuhan di kota ini pada tanggal 30 Nopember 1998. Peristiwa yang memakan korban harta benda yang tidak sedikit ini mengusik kehidupan masyarakat yang selama ini tergolong rukun dan damai di Kupang, bahkan di NTT pada umumnya.

B. Permasalahan

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah dikemukakan, timbul pertanyaan penelitian yang diangkat menjadi permasalahan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi kehidupan beragama masyarakat di NTT pasca konflik?
2. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam membina dan memelihara kerukunan?
3. Faktor-faktor apakah yang menunjang dan menghambat pemeliharaan kerukunan itu?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dapat memberi jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diangkat menjadi permasalahan penelitian ini. Karena itu penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan suasana kerukunan umat beragama pasca konflik di NTT, meliputi aktifitas keagamaan, interaksi sosial, upaya-upaya pemerintah dan

masyarakat untuk memelihara kerukunan, dan faktor penunjang dan penghambat kerukunan itu.

Data dan informasi ini diharapkan menjadi acuan untuk memprediksi dan membina kerukunan hidup masyarakat di masa depan. Karena itu sangat bermanfaat bagi instansi pemerintah, utamanya Departemen Agama dan Pemerintah Daerah, serta institusi-institusi keagamaan, tokoh-tokoh masyarakat dan agama, serta umat beragama pada umumnya. Di samping itu diharapkan juga menjadi bahan bacaan dan informasi bagi semua pihak yang membutuhkannya, misalnya untuk menjadi bahan bandingan pada daerah-daerah lainnya.

D. Kerangka Teori dan Batasan Konsep

Ada dua konsep yang perlu didefinisikan dalam penelitian ini agar penelitian terarah, yaitu kerukunan hidup dan konflik sosial. Kata kerukunan berasal dari kata rukun yang berarti: 1. Baik dan damai, tidak bertentangan, 2. Bersatu hati, bersepakat. Kerukunan hidup berarti prihal hidup rukun, yaitu hidup dalam suasana baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati dan bersepakat. Dalam kehidupan sehari-hari istilah kerukunan hidup sering kali disamakan dengan toleransi, saling pengertian, saling penghargaan, keserasian atau harmoni hubungan bermasyarakat. Dalam kerukunan terkandung pengertian pengakuan adanya perbedaan dan saling menghargai eksistensi masing-masing. Kerukunan dalam ilmu sosial tercakup dalam konsep integrasi yang biasa dipertentangkan dengan konflik.

Menurut Selo Soemardjan (1974:177), bentuk-bentuk interaksi sosial dapat merupakan kerjasama (*cooperation*), tetapi dapat juga berbentuk persaingan (*competition*), dan bahkan dapat berbentuk pertentangan atau pertikaian (*conflict*). Bentuk lain dari interaksi sosial ialah akomodasi (*accomodation*) yang biasanya dicapai setelah pihak-pihak yang terlibat konflik dapat mengakhiri atau menyelesaikan konflik mereka dan berusaha menciptakan hubungan kerja (*working relationship*). Bentuk kerjasama dan akomodasi dalam interaksi sosial tersebut dijadikan batasan tentang kerukunan dalam penelitian ini. Sedangkan persaingan, meskipun dapat dikategorikan sebagai konflik, namun dipandang sebagai cikal bakal konflik kecuali jika sudah menjurus pada pertentangan.

Konflik sosial adalah proses atau keadaan di mana dua atau lebih pihak berusaha menggagalkan tercapainya tujuan masing-masing pihak disebabkan adanya perbedaan pendapat, nilai-nilai, ataupun tuntutan dari masing-masing pihak (Sudjanti, 1993:11). Konflik sosial yang dimaksudkan

dalam penelitian ini sebagaimana yang dikemukakan Athon Mudzhar, ialah suatu keadaan di mana sekelompok orang dengan identitas yang jelas terlibat pertentangan secara sadar dengan satu kelompok lain atau lebih, karena mengejar tujuan-tujuan yang bertentangan, baik dalam nilai maupun dalam klaim terhadap status, kekuasaan, atau sumber-sumber daya yang terbatas dan dalam prosesnya ditandai oleh adanya upaya pihak-pihak yang terlibat untuk saling menetralisasi, mencederai, atau bahkan mengeliminasi posisi atau eksistensi lawan (Isre, 2003: 2).

Kerukunan sebagai interaksi sosial bersifat dinamis. Suatu masyarakat atau kelompok masyarakat yang semula rukun, bisa menjadi tidak rukun, dan sebaliknya suatu masyarakat atau kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak rukun dapat kembali menjadi rukun. Perubahan dari rukun menjadi tidak rukun atau sebaliknya, tergantung dari proses interaksi dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Konflik merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang terjadi akibat adanya ketegangan antara satu pihak dengan pihak lain. Suatu pertikaian atau konflik tidak mungkin berlangsung selamanya. Pada suatu saat konflik tersebut akan mendapat penyelesaian. Penyelesaian suatu konflik mungkin hanya berlangsung sementara waktu, dalam arti semua pihak tidak puas sepenuhnya (Soemardjan, 1974: 177).

Kerukunan dan konflik dalam kehidupan masyarakat bagaikan dua sisi mata uang yang senantiasa ada dalam masyarakat, terutama masyarakat plural. Semua masyarakat yang berbudaya menginginkan kerukunan itu senantiasa terpelihara, dan konflik yang ada tidak merusak kerukunan itu. Berkaitan dengan ini, para ahli terbagi pada dua golongan atau aliran dengan pendekatan masing-masing, yaitu penganut teori fungsional dan penganut teori konflik.

Golongan pertama (fungsional) memakai pendekatan persamaan dengan perspektif konsensus (T. Parsons, Kingsley Davis, dan R. Merton). Golongan kedua memakai pendekatan dengan perspektif konflik, yakni memusatkan perhatian terhadap perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat.

Di samping pendekatan interaksi sosial sebagaimana telah dikemukakan, dalam penelitian ini yang dijadikan acuan adalah pendekatan konflik. Perspektif konflik yang dimaksudkan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhaimin (dalam Isre, 2003: viii) adalah menekankan pada cara penyelesaian melalui prosedur rasional dalam "meja penyelesaian bersama" sebagai sarana negosiasi yang wajar antar berbagai kelompok

masyarakat untuk memelihara kerukunan, dan faktor penunjang dan penghambat kerukunan itu.

Data dan informasi ini diharapkan menjadi acuan untuk memprediksi dan membina kerukunan hidup masyarakat di masa depan. Karena itu sangat bermanfaat bagi instansi pemerintah, utamanya Departemen Agama dan Pemerintah Daerah, serta institusi-institusi keagamaan, tokoh-tokoh masyarakat dan agama, serta umat beragama pada umumnya. Di samping itu diharapkan juga menjadi bahan bacaan dan informasi bagi semua pihak yang membutuhkannya, misalnya untuk menjadi bahan bandingan pada daerah-daerah lainnya.

D. Kerangka Teori dan Batasan Konsep

Ada dua konsep yang perlu didefinisikan dalam penelitian ini agar penelitian terarah, yaitu kerukunan hidup dan konflik sosial. Kata kerukunan berasal dari kata rukun yang berarti: 1. Baik dan damai, tidak bertentangan, 2. Bersatu hati, bersepakat. Kerukunan hidup berarti prihal hidup rukun, yaitu hidup dalam suasana baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati dan bersepakat. Dalam kehidupan sehari-hari istilah kerukunan hidup sering kali disamakan dengan toleransi, saling pengertian, saling penghargaan, keserasian atau harmoni hubungan bermasyarakat. Dalam kerukunan terkandung pengertian pengakuan adanya perbedaan dan saling menghargai eksistensi masing-masing. Kerukunan dalam ilmu sosial tercakup dalam konsep integrasi yang biasa dipertentangkan dengan konflik.

Menurut Selo Soemardjan (1974:177), bentuk-bentuk interaksi sosial dapat merupakan kerjasama (*cooperation*), tetapi dapat juga berbentuk persaingan (*competition*), dan bahkan dapat berbentuk pertentangan atau pertikaian (*conflict*). Bentuk lain dari interaksi sosial ialah akomodasi (*accomodation*) yang biasanya dicapai setelah pihak-pihak yang terlibat konflik dapat mengakhiri atau menyelesaikan konflik mereka dan berusaha menciptakan hubungan kerja (*working relationship*). Bentuk kerjasama dan akomodasi dalam interaksi sosial tersebut dijadikan batasan tentang kerukunan dalam penelitian ini. Sedangkan persaingan, meskipun dapat dikategorikan sebagai konflik, namun dipandang sebagai cikal bakal konflik kecuali jika sudah menjurus pada pertentangan.

Konflik sosial adalah proses atau keadaan di mana dua atau lebih pihak berusaha menggagalkan tercapainya tujuan masing-masing pihak disebabkan adanya perbedaan pendapat, nilai-nilai, ataupun tuntutan dari masing-masing pihak (Sudjanti, 1993:11). Konflik sosial yang dimaksudkan

dalam penelitian ini sebagaimana yang dikemukakan Athon Mudzhar, ialah suatu keadaan di mana sekelompok orang dengan identitas yang jelas terlibat pertentangan secara sadar dengan satu kelompok lain atau lebih, karena mengejar tujuan-tujuan yang bertentangan, baik dalam nilai maupun dalam klaim terhadap status, kekuasaan, atau sumber-sumber daya yang terbatas dan dalam prosesnya ditandai oleh adanya upaya pihak-pihak yang terlibat untuk saling menetralisasi, mencederai, atau bahkan mengeliminasi posisi atau eksistensi lawan (Isre, 2003: 2).

Kerukunan sebagai interaksi sosial bersifat dinamis. Suatu masyarakat atau kelompok masyarakat yang semula rukun, bisa menjadi tidak rukun, dan sebaliknya suatu masyarakat atau kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak rukun dapat kembali menjadi rukun. Perubahan dari rukun menjadi tidak rukun atau sebaliknya, tergantung dari proses interaksi dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Konflik merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang terjadi akibat adanya ketegangan antara satu pihak dengan pihak lain. Suatu pertikaian atau konflik tidak mungkin berlangsung selamanya. Pada suatu saat konflik tersebut akan mendapat penyelesaian. Penyelesaian suatu konflik, mungkin hanya berlangsung sementara waktu, dalam arti semua pihak tidak puas sepenuhnya (Soemardjan, 1974: 177).

Kerukunan dan konflik dalam kehidupan masyarakat bagaikan dua sisi mata uang yang senantiasa ada dalam masyarakat, terutama masyarakat plural. Semua masyarakat yang berbudaya menginginkan kerukunan itu senantiasa terpelihara, dan konflik yang ada tidak merusak kerukunan itu. Berkaitan dengan ini, para ahli terbagi pada dua golongan atau aliran dengan pendekatan masing-masing, yaitu penganut teori fungsional dan penganut teori konflik.

Golongan pertama (fungsional) memakai pendekatan persamaan dengan perspektif konsensus (T. Parsons, Kingsley Davis, dan R. Merton). Golongan kedua memakai pendekatan dengan perspektif konflik, yakni memusatkan perhatian terhadap perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat.

Di samping pendekatan interaksi sosial sebagaimana telah dikemukakan, dalam penelitian ini yang dijadikan acuan adalah pendekatan konflik. Perspektif konflik yang dimaksudkan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhaimin (dalam Isre, 2003: viii) adalah menekankan pada cara penyelesaian melalui prosedur rasional dalam "meja penyelesaian bersama" sebagai sarana negosiasi yang wajar antar berbagai kelompok

atau golongan. Dalam hal ini diasumsikan bahwa gejolak-gejolak sosial tidak akan uncul apabila persoalan di seputar itu sejak semula ditangani secara baik dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan serta menghasilkan solusi yang saling menguntungkan bersama.

Dengan mengadaptasi ceramah DR.Tamrin Amal Tomangola, M.Atho Mudzharmengemukakan, suatu konflik sosial biasanya terjadi karena bertemunya empat elemen utama dalam waktu yang bersamaan. Keempat elemen itu ialah *fasilitating contexts* (konteks pendukung), *core (roots) of conflict* (akar konflik), *fuse factor* (sumbu), dan *tringgering factors* (pemicu) (Isre, 2003:5)

E. Studi Pustaka

Timbulnya berbagai konflik-konflik sosial yang bernuansa agama yang akhir-akhir ini semakin marak di berbagai daerah merupakan fenomena sosial yang membahayakan integrasi bangsa yang pada gilirannya dapat memecah kesatuan dan persatuan bangsa. Untuk itu, konflik-konflik sosial itu perlu penanganan dan penyelesaian yang bijaksana dan tepat. Pengkajian terhadap kondisi kehidupan masyarakat, baik yang terpelihara dalam kerukunan maupun yang terjadi konflik menjadi perhatian berbagai pihak.

Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan telah melakukan berbagai penelitian dan pengkajian terhadap kerukunan hidup umat beragama dan konflik-konflik yang bernuansa agama di berbagai provinsi. Hasil-hasil penelitian dan pengkajian itu telah diterbitkan dalam berbagai media cetak. Gambaran yang aktual tentang berbagai dinamika dan kondisi sosial, agama dan masyarakat terungkap lewat kajian pemetaan kerukunan di berbagai provinsi, yaitu: Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Bali, NTB, NTT, Kalsel, Kaltim, dan Sulateng (lihat Puslitbang, 2003a). Pengkajian dan penelitian terhadap konflik sosial yang bernuansa agama juga telah dilakukan pada berbagai daerah yang terlibat konflik, yaitu di daerah-daerah: Banjarmasin, Kalimantan Barat, Mataram, Poso, Kupang, Lampung, Ambon, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur (lihat Puslitbang, 2003b).

Tulisan Ibnu Hasan Mukhtar tentang Peta Kerukunan Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan tentang Konflik-Konflik Sosial Bernuansa Agama, Studi Kasus Kerusuhan Kupang Nusa Tenggara Timur (30 Nopember 1998) yang termuat dalam kedua buku tersebut, telah memberikan gambaran makro tentang kerukunan hidup masyarakat di daerah ini. Demikian juga deskripsi tentang kerusuhan Kupang dan penyelesaiannya.

Kedua tulisan ini mendorong pemilihan NTT sebagai pusat kajian untuk melihat lebih lanjut wujud kerukunan dan upaya-upaya memeliharanya. Karena itu kajian ini dapat dikatakan kelanjutan kajian sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, pengamatan, studi dokumen dan pustaka. Wawancara dilakukan terhadap tokoh-tokoh pemerintah, baik di lingkungan Pemda maupun Departemen Agama, serta tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya. Pengamatan dilakukan terhadap kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Studi dokumen dan pustaka dilakukan dengan menemukan dokumen dan kepustakaan yang relevan dengan penelitian.

Data dan informasi yang terkumpul diolah secara kualitatif dengan klasifikasi atau kategorisasi, lalu dianalisis, dideskripsikan, dan diinterpretasi berdasarkan tujuan dan kerangka teori yang dipedomani.

II. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

A. Keadaan Geografis dan Demografis

NTT adalah provinsi kepulauan yang menghimpun 566 pulau besar dan kecil; 246 pulau di antaranya yang mempunyai nama dan selebihnya 320 pulau belum diberi nama. Dari sejumlah pulau tersebut, hanya 42 pulau yang dihuni oleh penduduk dan sebanyak 3 diantaranya tergolong besar, yaitu: Pulau Flores, Pulau Timor, dan Pulau Sumba.

Sebagai daerah kepulauan, perairannya cukup luas sekitar 200.000 km. persegi. Adapun luas daratannya sekitar 47.339,9 km². Pulau di NTT yang terluas adalah Pulau Timor yang luasnya 14.394,9 km² (tidak termasuk Timor Leste) atau 30,41% dari daratan NTT, diikuti oleh P. Flores yang luasnya 14.231 km² (30,06%), dan P. Sumba yang luasnya 11.040 km² (23,32%).

Penduduk NTT (2003) berjumlah 4.088.058 jiwa terdiri atas laki-laki sebanyak 2.041.089 jiwa (49,93 %) dan perempuan berjumlah 2.046.969 jiwa (50,07 %). Penduduk tersebut terkelompok dalam 858.753 rumah tangga. Hampir semua penduduk tersebut berstatus WNI, yang berstatus WNA hanya 624 orang. Penduduk tersebut tersebar pada ke 15 kabupaten/kota yang ada secara tidak merata. Kota Kupang sebagai pusat administrasi pemerintahan, pusat ekonomi, pusat pendidikan merupakan daerah yang

paling padat penduduknya, yaitu: 1.566 jiwa per-km². Persebaran penduduk pada setiap kabupaten/kota terlihat pada tabel: 1

Tabel 1. Luas Wilayah Tiap-Tiap Kabupaten di NTT, Jumlah Penduduk Masing-Masing Kabupaten, serta Rata-Rata Kepadatannya pada Tahun 2003.

Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Penduduk	Rerata/Km ²
1. Sumba Barat	4.051,90	386.557	95
2. Sumba Timur	7000,50	198.186	28
3. Kupang	5.898,20	332.419	56
4. TTS	3.947,00	404.516	103
5. TTU	2.669,70	177.918	67
6. Belu	2.445,60	331.412	136
7. Alor	2.864,60	168.965	59
8. Lembata	1.266,40	97.733	77
9. Flores Timur	1.812,85	215.876	119
10. Sikka	1.731,90	275.590	159
11. Ende	2.046,60	238.486	117
12. Ngada	3.037,90	244.242	80
13. Manggarai	7.136,40	661.337	93
14. Rote Ndao	1.280,00	102.651	80
15. Kota Kupang	160,35	251.170	1.566
NTT	47.349,90	4.088.058	86

Sumber: Provinsi NTT dalam Angka 2003 (diolah)

Pada tabel 1 terlihat bahwa penduduk NTT belum padat, rata-rata per-km² hanya 86 orang. Hanya di Kota Kupang sebagai ibukota provinsi yang padat penduduknya seperti telah dikemukakan. Sedang yang paling jarang penduduknya adalah Kab. Sumba Timur, hanya 28,3 penduduk per-km². Melihat kondisi penduduk demikian ini, seharusnya daerah ini menjadi objek transmigrasi untuk pemerataan penduduk, namun kenyataannya mobilitas penduduk keluar karena berbagai keperluan, seperti mencari penghidupan yang lebih baik, cukup tinggi. Hal ini tentunya menyebabkan semakin menurunnya kepadatan penduduk.

B. Administrasi Pemerintahan

Sumber sejarah tertulis mengenai NTT baru muncul setelah banyaknya pendatang dari luar yang mengunjungi wilayah ini guna melakukan perdagangan. Sumber-sumber ini mengungkapkan bentuk pemerintahan tradisional di berbagai daerah di NTT adalah kerajaan. Berbagai kerajaan-kerajaan kecil terdapat di berbagai daerah. Daerah Belu Selatan disebutkan

sebagai kerajaan tertua. Hampir semua raja di Timor mengatakan bahwa nenek moyang mereka berasal dari Belu Selatan atau mempunyai hubungan dengannya.

Sejak kapan kerajaan-kerjaan di NTT muncul, sulit dipastikan karena kurangnya sumber sejarah. Beberapa ahli sejarah memperkirakan pertumbuhan kerajaan-kerajaan tersebut tidak jauh waktunya dengan perkembangan komoditi kayu cendana, yaitu sekitar abad ketiga. Pada abad tersebut banyak perahu pedagang antar pulau yang membeli kayu cendana langsung dari Sumba atau Timor untuk dibawa ke pelabuhan transit di bagian barat Nusantara dan selanjutnya diteruskan ke India. Pada tahun-tahun berikutnya berdatangan para pedagang dari Cina (Anonim, 1992:9).

Seiring perkembangan perdagangan ini, terjadi perkembangan kerajaan-kerajaan yang ada. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya hubungan perdagangan dan selanjutnya hubungan politik dengan kerajaan besar di luar NTT. Dalam buku *Negara Kertagama* karya Mpu Prapanca, disebutkan bahwa Sumba Timor dan Solor menjalin hubungan yang akrab dengan Kerajaan Majapahit. Cerita-cerita rakyat di Sabu, Pantar, Flores Timur, dan beberapa daerah lainnya juga menyinggung adanya hubungan serupa. Dari hubungan perdagangan ini kemudian terjalin hubungan politik. Ketika Patih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit mencetuskan gagasan untuk menyatukan Nusantara, satu demi satu kerajaan-kerajaan di Flores, Alor, Pantar, Sumba, dan Timor, dan lain-lain tunduk di bawah pengaruh Majapahit (Anonim. 1992:10)

Pada masa penjajahan negara-negara Eropa, seperti Portugis dan Belanda di Nusantara ini, NTT dibagi oleh kedua negara tersebut, yang pengaruhnya tampak sampai saat ini dalam pemeluk agama bagi masyarakat. Bekas jajahan Portugis mayoritas beragama Katholik; sedang bekas jajahan Belanda mayoritas beragama Kristen Protestan. Bentuk pemerintahan saat itu diatur oleh penjajah.

Memasuki masa kemerdekaan terjadi perubahan mendasar dalam bentuk pemerintahan, sebagaimana daerah-daerah lainnya di Indonesia. NTT pada mulanya merupakan bagian dari daerah provinsi bernama Sunda Kecil yang terbentuk sejak tanggal 19 Agustus 1945. Sejak tanggal 14 Agustus 1958, Undang-Undang Nomor 64/1958 menetapkan status NTT sebagai Daerah Tkt.I (sekarang Provinsi) yang sebelumnya masuk pada Provinsi Sunda Kecil, yang biasa juga disebut Provinsi Nusa Tenggara bersama dengan Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Daerah Tkt.I NTT meliputi daerah Flores, Sumba, dan Timor yang keseluruhannya terdiri dari 12 daerah swatantra Tkt.II.

Pada ke 12 daerah Tkt.II (kabupaten) ini terdapat 90 kecamatan kemudian dimekarkan menjadi 97 kecamatan pada masa pemerintahan gubernur NTT pertama Lala Mentik. Pada sisi lain, jumlah desa yang tadinya mencapai 4.555 diciutkan menjadi 1.720 desa gaya baru. Pada tahun 2003 di NTT terdapat 15 kabupaten / kota madya yang bervariasi dari segi luas wilayah dan penduduknya. Jumlah kecamatan yang terdapat pada ke-15 kabupaten kota tersebut adalah 197 buah yang terbagi menjadi 2.585 desa/kelurahan.

C. Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Berbagai kepustakaan mengungkapkan, paling sedikit di Provinsi NTT terdapat 15 kelompok utama etnik, 75 kesatuan etnik yang tersebar di seluruh wilayah NTT. Setiap etnik tersebut tetap mempunyai isi kebudayaan yang berbeda, bahasa maupun adat istiadat. Ke-75 etnik itu masih dirinci lagi dalam 500 sub etnik yang di NTT disebut suku. Mubyarto dkk, mengakui bahwa masyarakat NTT dapat dikelompokkan dalam 5 kelompok etnik besar, yaitu: Timor, Sumba, Rote, Sabu, Flores, dan Alor. (Liliweri, 1994:i).

Kemajemukan masyarakat NTT semakin bertambah setelah kedatangan para pendatang dari luar. Kedatangan mereka di NTT berlatar belakang ekonomi. Pendatang Bugis Makassar dewasa ini, selain menekuni bidang nelayan, juga perdagangan eceran dan atau pedagang keliling. Mereka juga menguasai perdagangan kayu dan khusus di Kota Kupang mereka mulai mendominasi usaha angkutan kota. Pendatang Minangkabau (Padang) menetap pada kota-kota kabupaten, ibukota provinsi, dan pelabuhan-pelabuhan penting serta pusat-pusat perdagangan. Mereka umumnya sebagai pedagang pakaian, pengusaha warung makan, dan penjahit. Orang-orang Jawa datang ke berbagai wilayah NTT sebagai: pegawai negeri, pedagang kaki lima, pedagang makanan terutama warung makanan, penjual bakso, tukang sol sepatu dan buruh serta penjual jasa. Umumnya mereka tinggal di kota provinsi dan kabupaten serta sekitar kota pelabuhan dan pusat perdagangan. Pedagang-pedagang Cina, terutama di Kota Kupang menguasai pusat-pusat pertokoan dan perdagangan dengan berdagang: barang kelontong, pakaian, bahan bangunan dan elektronik. Mereka juga melibatkan diri pada perdagangan hasil pertanian.

Di NTT pada umumnya perekonomian di kota-kota dan di pelabuhan-pelabuhan didominasi oleh para pendatang. Penduduk asli lebih banyak melibatkan diri sebagai pegawai atau karyawan, di samping usaha pertanian. Rumah/toko yang mereka miliki pada sentra-sentra ekonomi pada umumnya dikontrakkan kepada pendatang. Putra putri mereka banyak yang bekerja sebagai karyawan pada pedagang/pengusaha pendatang. Keberadaan mereka

pada pasar-pasar tradisional cenderung marginal sebagai penjual hasil-hasil pertanian berupa sayur mayur dan buah-buahan.

D. Potensi Keagamaan Masyarakat

Berdasarkan data pada Kantor Wilayah Departemen Agama NTT (2005), mayoritas penduduk NTT (56,79 %) beragama Katholik. Yang beragama Kristen sebesar 31,97 % dan beragama Islam hanya 8,34 %. Selain itu terdapat juga penduduk yang beragama Hindu, Budha, dan agama lainnya.

Di wilayah NTT, terdapat perbedaan komposisi penduduk dari segi agama yang dianut. Agama Katholik dominan dianut penduduk di Pulau Flores, dan Pulau Timor bagian tengah (Kab. Belu dan Kab. Timor Tengah Utara). Adapun agama Kristen Protestan dominan dianut penduduk Pulau Timor (Kab. Timor Tengah Selatan dan Kab. Kupang), Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Alor dan Pulau Sumba. Sedangkan agama Islam merupakan agama minoritas yang dianut oleh penduduk di sekitar pantai dan pusat-pusat perdagangan.

Kabupaten-kabupaten yang penduduknya mayoritas beragama Katholik adalah: 1. Manggarai, 2. Ngada, 3. Ende, 4. Sikka, 5. Flores Timur (semuanya di Pulau Flores), 6. Belu, 7. Timor Tengah Utara (keduanya di Pulau Timor), dan 8. Lembata. Sedang kabupaten-kabupaten yang mayoritas penduduknya beragama Protestan adalah: 1. Timor Tengah Selatan (TTS), 2. Kab. Kupang (termasuk Rote dan Sabu), 3. Kota Kupang, 4. Sumba Timur, 5. Sumba Barat, dan 6. Alor. Di Kabupaten Alor penduduk yang beragama Islam jumlahnya cukup banyak, khususnya di daerah pantai dan pulau-pulau sekitar Pulau Alor. Untuk jelasnya lihat tabel: 2

Tabel: 2 Jumlah Pemeluk Agama per-Kabupaten/Kota se NTT Tahun 2004

Kab./Kota	Katholik	Kristen	Islam	Hindu	Budha	Lain	Jumlah
1. Kota Kupang	78.100	278.829	42.839	5.871	523	-	406.162
2. Kab. Kupang	254.939	277.436	12.879	958	85	15.545	561.824
3. Kab. TTS	56.718	346.625	8.126	360	-	390	412.219
4. Ka. b. TTU	248.524	12.564	2.620	207	-	326	264.241
5. Kab. Belu	456.899	43.265	4.698	395	55	-	505.312
6. Kab. Alor	6.946	126.179	37.034	170	1	-	170.330
7. Kab. Lembata	69.888	512	23.497	35	140	-	94.072
8. Kab. Flotim	149.654	802	62.932	250	-	689	214.327
9. Kab. Sikka	256.757	2.572	21.007	357	-	-	280.693
10. Kab. Ende	188.637	4.107	65.589	362	35	-	258.730
11. Kab. Ngada	213.621	2.193	16465	227	-	-	232.506
12.. Kab. Manggarai	569.642	3.232	60.404	379	80	338	634.075
13. Kab. Sumlim	14.546	197.888	9.265	327	5	33.937	255.968
14. Kab. Sumba	11.951	154.425	11.224	220	-	69.251	247.071
Jumlah	2.576.822	1.450.629	378.579	10.118	924	120.476	4537548

Sumber: Kanwil Dep. Agama Provinsi NTT

Pada tabel 2 terlihat bahwa kebanyakan penduduk Kota Kupang (278.829 jiwa) atau 68,9 % beragama Kristen. Sedang beragama Katholik sebanyak 78.100 jiwa atau 19,23 %; dan yang beragama Islam hanya 42.839 jiwa atau 10,55 %. Sama halnya di Kabupaten Alor, mayoritas penduduknya (126.179 jiwa) atau 74,08 % beragama Kristen. Hanya saja posisi kedua ditempati oleh penduduk beragama Islam, yaitu 37.034 jiwa atau 21,74 %; sedang yang beragama Katholik hanya 6.946 jiwa atau 4,08 %. Beda halnya di Kabupaten Sikka, sebagaimana di kabupaten-kabupaten lain di Pulau Flores, mayoritas penduduknya (256.757 jiwa) atau 91,47 % beragama Katholik. Posisi kedua ditempati oleh yang beragama Islam sejumlah 21.007 jiwa (7,48 %); sedang yang beragama Kristen hanya 2.572 jiwa (0,92 %).

Kegiatan keagamaan bagi setiap umat beragama dipusatkan pada rumah-rumah ibadah, karena itu pembangunan rumah-rumah ibadah sangat dipentingkan oleh setiap umat beragama dan pemerintah. Terutama bagi Katholik, Kristen dan Islam, jumlah rumah ibadah bagi mereka cukup besar. Tercatat pada Kantor Departemen Agama Provinsi NTT (2005), gereja bagi umat Katholik berjumlah 2.468 buah, gereja bagi umat Kristen sebanyak 4.067 buah, masjid berjumlah 902 buah, Pura sebanyak 20 buah, dan Wihara hanya 1 buah, yaitu di Kota Kupang.

Gereja bagi umat Kristen jumlahnya lebih besar dibanding bagi umat Katholik. Hal ini dikarenakan jumlah aliran atau sekte bagi umat Kristen sangat banyak. Berbeda dengan umat Katholik, umat Kristen Protestan terbagi-bagi kepada aliran atau sekte yang jumlahnya ratusan. Di NTT terdapat 3 persekutuan gereja yang cukup dikenal, yaitu : 1. Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Wilayah NTT yang mengkoordinir 6 gereja; 2. Persekutuan Injili Indonesia (PII) yang mengkoordinir 9 gereja; dan Persekutuan Gereja Pekabaran Injil yang mengkoordinir 5 gereja. Selain itu, terdapat pula gereja-gereja yang independen (tidak bernaung di bawa ketiga persekutuan tersebut), yaitu: 1. Adven, 2. Gereja Baptis Indonesia, 3. Balai Keselamatan, 4. Gereja Bebas Sumba Timur, dan 5. Gereja-Gereja Reformasi Indonesia.

Di Kota Kupang, rumah-rumah ibadah tersebar pada keempat kecamatan yang ada. Bagi umat Kristen terdapat gereja sebanyak 232 buah, dan bagi umat Katholik terdapat gereja sebesar 32 buah. Adapun bagi umat Islam hanya terdapat 36 buah masjid, sedang rumah ibadah lainnya adalah pura 2 buah, Vihara 1 buah, dan klenteng 1 buah. Sedang di Kab.Sikka, Gereja bagi umat Katholik tercatat sebanyak 213 buah, bagi Kristen hanya 15 buah, dan masjid sebanyak 50 buah. Rumah ibadah lainnya yang ada

ialah 3 buah pura bagi umat Hindu. Adapun di Kab. Alor, gereja bagi umat Kristen sebesar 557 buah, bagi umat Katholik 25 buah, dan masjid bagi umat Islam sebanyak 104 buah. Rumah ibadah lain yang ada hanya sebuah pura.

Perkembangan kehidupan beragama masyarakat banyak ditentukan oleh peranan tokoh agama (rohaniawan). Bagi umat Katholik di NTT, tercatat adanya Uskup sebanyak 8 orang, di Kab. TTU dan Manggarai masing-masing 2 orang, dan di Kab. Kupang, Alor, Flores Timur dan Sumba barat masing-masing 1 orang. Di samping terdapat pula Pastor sebanyak 795 orang yang tersebar pada semua kabupaten/kota yang ada. Pendeta bagi umat Kristen di NTT sebanyak 1771 orang yang tersebar pada semua kabupaten/kota. Adapun bagi umat Islam tercatat ulama sebanyak 15 orang dan penyuluh/muballig sebanyak 473 orang yang tersebar pada semua kabupaten/kota yang ada.

Di Kota Kupang tercatat rohaniawan bagi umat Kristen sebanyak 4.626 orang, termasuk guru Injil, guru Sekolah Minggu, dan lainnya. Bagi umat Katholik terdapat rohaniawan berupa uskup 1 orang dan pastor 60 orang. Di samping itu terdapat Bruder 29 orang dan suster 183 orang. Bagi umat Islam terdapat ulama/muballig sebanyak 123 orang, dan bagi umat Hindu terdapat rohaniawan 4 orang.

Pendidikan agama formal berupa sekolah hanya dimiliki oleh umat Islam, baik negeri maupun swasta. Di seluruh NTT berdasarkan data 2003 terdapat MIN/MIS sebanyak 112 madrasah; MTsN/MTsS sebanyak 45 madrasah; MAN/MAS sebanyak 14 madrasah dan Pesantren 14 buah, dan seluruhnya 187 buah. Di Kota Kupang masing-masing tingkatan/jenis tersebut terdapat madrasah sebanyak 3, 1, 1, dan 3, yang seluruhnya berjumlah 8 buah.

Di Kota Kupang, organisasi Islam Muhammadiyah, selain membina sekolah atau madrasah, mulai dari TK sampai sekolah lanjutan, juga membina perguruan tinggi, yaitu Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK). Para mahasiswa yang diterima di perguruan ini bukan hanya yang beragama Islam, tetapi juga yang non-Muslim. Mereka belajar bersama dengan mahasiswa Muslim dalam berbagai fakultas yang ada.

Setiap kelompok umat beragama membina berbagai lembaga atau organisasi keagamaan yang bermacam-macam, namun sebagai representasi kelompok umat beragama ke luar (*out group*), umat Kristen diwakili oleh GMIT, Katholik oleh MAWI, dan Umat Islam oleh MUI. Ketiga organisasi keagamaan ini yang menjadi simbol kerjasama dan kerukunan dan Pemerintah.

III. TEMUAN PENELITIAN

A. Kehidupan Beragama Masyarakat

Telah dikemukakan, bahwa di NTT terdapat tiga pemeluk agama yang menonjol, yaitu: Katholik, Kristen, dan Islam. Dilihat dari segi pola pemukiman terdapat konsentrasi-konsentrasi masing-masing kelompok agama pada setiap kabupaten/kota; namun pada wilayah-wilayah tertentu terjadi percampuran antar kelompok itu.

Dalam perjalanan sejarah, umat beragama di NTT dapat hidup berdampingan secara damai sejak dahulu. Konflik-konflik yang terdapat dalam masyarakat tidak mengganggu secara nyata kedamaian itu, hanya bersifat kasuistik yang terselesaikan dengan cepat dan dampak negatifnya tidak meluas. Karena itu, peristiwa kerusuhan 30 Nopember 1998 cukup mengejutkan semua pihak, baik pemerintah maupun umat beragama.

Pembinaan keagamaan secara internal kelompok agama di NTT berjalan dengan baik. Lembaga/institusi keagamaan yang dikendalikan oleh tokoh/pemuka agama memainkan perannya dengan baik. Mereka berperan dalam pembinaan keagamaan umatnya, baik secara institusi maupun perorangan.

Pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan agama berjalan dengan baik. Hal ini terjadi karena dedikasi dan partisipasi umat beragama itu sendiri dan Pemerintah. Partisipasi pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah dan Departemen Agama dalam pembinaan kehidupan beragama masyarakat sangat besar. Di bidang pendidikan formal, Departemen Agama menyiapkan guru-guru agama. Keterbatasan yang dimilikinya menyebabkan masih terdapat kekurangan guru agama. Kekurangan ini sebagian tertutupi dengan adanya program guru kontrak oleh Pemda, dan sebagian lainnya dengan pengangkatan guru honorer oleh institusi pendidikan masing-masing.

Pendidikan agama secara informal dan non formal dilakukan oleh umat beragama itu sendiri. Namun bantuan Pemerintah dalam bidang ini cukup besar, misalnya bantuan finansial. Departemen Agama menyiapkan tenaga penyuluh "formal" dari PNS, dan tenaga penyuluh "kontrak" yang direkrut dari institusi-institusi keagamaan.

Secara internal, Umat Kristen mempunyai varian kelompok yang cukup besar. Di NTT, termasuk di Kota Kupang, terdapat beberapa persekutuan gereja, yaitu Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Persekutuan Injili Indonesia (PII), dan Persekutuan Gereja Pekabaran Injil (PGPI). Pada ketiga persekutuan itu bergabung lagi beberapa gereja, sehingga variannya

lebih besar. Di samping ketiga persekutuan itu, terdapat pula gereja-gereja yang menganggap dirinya independen, seperti Adven, Gereja Baptis Indonesia, dan Balai Keselamatan.

Di kalangan umat Katholik varian ini tidak terlihat, bahkan diakui hanya satu macam gereja, yaitu gereja Katholik. Adapun di kalangan umat Islam, meskipun terdapat pula beberapa varian keagamaan, tetapi varian ini sangat terbatas pada hala-hal yang tidak prinsipil (*Khilafiyah*). Semua mesjid di Kupang adalah milik umat Islam tanpa kecuali. Keberadaan kolompok/ organisasi Islam, seperti NU dan Muhammadiyah tidak mengkapling umat secara nyata.

Pendidikan agama secara formal berupa sekolah hanya dimiliki oleh umat Islam, yang bernama madrasah. Bagi umat Kisten dan Katholik, sekolah agama secara formal tidak ada, yang ada hanyalah pendidikan formal pada mata pelajaran agama di sekolah, dan pendidikan non formal di lingkungan gereja. Bahkan bagi umat Katholik pendirian sekolah agama, yang di dalamnya terdapat campur tangan pemerintah secara langsung merupakan pantangan.

Upacara-upacara keagamaan bagi masing-masing agama terpelihara dengan baik. Upacara-upacara yang bersifat ritual dilaksanakan masing-masing agama tanpa terlibat langsung agama lain. Sedang yang bersifat seremonial, keterlibatan umat lain sering terjadi, dengan memberikan bantuan baik berupa material maupun tenaga; bahkan umat lain sering menghadiri acara keagamaan itu.

B. Konflik-Konflik Sosial Keagamaan Masyarakat

Mubyartodkk. mengakui bahwa masalah yang dihadapi masyarakat NTT adalah masyarakatnya yang masih lebih sering menampilkan kohesi sosial yang erat bagi kelompok (etnik) sendiri (Liliweri. 1994:5). Dari segi perspektif historis, banyak hasil studi menunjukkan bahwa NTT merupakan daerah yang penuh dengan konflik-konflik sosial. Misalnya perang antara suku yang sering terjadi; ramainya perdagangan budak di wilayah ini sejak abad ke-15 sampai abad ke-18; dan sengketa-sengketa yang berhubungan dengan tanah-tanah garapan dan batas-batas wilayah sebagai sumber-sumber antar etnik Selain itu, konflik-konflik yang bernuansa keagamaan turut mewarnai perspektif historis ini. Misalnya perang antara orang Islam dari Terong dan sekutu-sekutunya di pesisir Solor dalam tahun 1590 melawan orang-orang Portugis yang Katholik. Pertentangan beraroma keagamaan ini mengundang keterlibatan Ternate yang diakui kekuasaannya atas Solor

dan campur tangan Belanda dan menyebabkan jatuhnya benteng Lewahayong tahun 1613 ke tangan Belanda. Perang antara orang-orang Islam dan orang Katholik juga sering terjadi di Pulau Ende antara 1614 sampai dengan jatuhnya pulau tersebut ke tangan Belanda tahun 1637 (Liliweri, 1994:29-30).

Beberapa tahun terakhir ini, sejak awal reformasi sebagai akses dari suatu perubahan, sampai saat ini kasus kekerasan kolektif di beberapa daerah di NTT masih sering muncul dengan latar belakang menggunakan sentimen agama dengan tujuan membenarkan (melegitimasi) sesuatu tindakan yang semula hanya untuk mempertahankan atau merebutkan kepentingan, baik ekonomi, politik atau sosial bagi seseorang atau sekelompok orang berhadapan dengan orang atau kelompok orang lain (Muchtar, 2003:222-223).

Berdasarkan data pada Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi NTT, kebanyakan peristiwa yang dikategorikan sebagai konflik umat beragama adalah pencemaran Hostia Kudus. Dari 37 peristiwa konflik yang tercatat pada kantor Wilayah Departemen Agama NTT, sebanyak 23 peristiwa adalah pencemaran Hostia. Di Kota Kupang tercatat 6 kali dan di Kabupaten Sikka 2 kali. Konflik lainnya yang terjadi di Kab. Sikka ialah penyebaran ajaran sesat dan penyebaran agama lain kepada umat lain. Satu-satunya peristiwa konflik keagamaan di Kab. Alor adalah perpindahan umat dari GMT ke GMAHK.

Konflik-konflik yang disebabkan oleh pencemaran Hostia semuanya terjadi karena ketidaktahuan penyebab konflik. Oknum dari Kristen Protastan karena alasan tertentu mengikuti upacara kebaktian bagi umat Katholik, dan karena ketidaktuannya dalam hal perlakuan terhadap Hostia Kudus, maka terjadi tindakan yang dinilai pencemaran. Konflik ini meskipun ada yang menimbulkan korban jiwa bagi pelaku, namun di Kota Kupang dan Kab. Sikka tidak terjadi demikian. Penyelesaian konflik melalui jalur hukum, artinya yang bersangkutan dihukum penjara, atau melalui pembinaan.

Kerusuhan yang terjadi di Kota Kupang pada tanggal 30 Nopember 1998 cukup mengejutkan bagi semua pihak. Gubernur NTT Piet Alexander Tallo, SH menyebutkan bahwa paling tidak ada tiga kategori penyebab yang memicu terjadinya kerusuhan di Kupang:., penyebab mendasar, penyebab tidak langsung, dan penyebab langsung. Yang tergolong penyebab mendasar adalah berbagai krisis yang berskala nasional, termasuk krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Termasuk dalam krisis kepercayaan ini adalah ketidakpuasan terhadap penanganan konflik dan kerusuhan yang

terjadi di luar NTT yang bernuansa agama. Faktor kesenjangan sosial yang berakibat kecemburuan sosial merupakan penyebab langsung

Penyebab-penyebab tersebut mendorong Umat Kristiani mengadakan upacara perkabungan pada tanggal 30 Nopemeber 1998. Upaca Perkabungan yang dimulai pada pagi hari bertempat di salah satu lapangan di Kota Kupang dan diikuti secara antusias dari berbagai elemen masyarakat Kupang, bahkan di luarnya. Upacara ini berkembang menjadi arak-arakan keliling kota dengan berbagai kendaraan. Sebagai eksekusi dari arak-arakan ini terjadi berbagai tindakan anarkis seperti pelemparan dan pengrusakan berbagai bangunan. Tindakan ini berkembang menjadi kerusuhan dengan pembakaran berbagai sarana dan bangunan, seperti kantor, rumah ibadah, dan rumah penduduk.

C. Dampak Konflik/Kerusuhan

Meskipun kerusuhan 30 Nopember 1998 di Kota Kupang tidak menimbulkan kerugian jiwa, tetapi menimbulkan kerugian material yang cukup besar, ditaksir mencapai Rp 5,525 milyar. Bangunan-bangunan yang terbakar atau mengalami kerusakan dapat dianggap sebagai kepunyaan umat Islam, seperti mesjid dan musahalla, kantor Pengadilan Agama, Asrama Haji, Universitas Muhammadiyah, rumah-rumah penduduk Muslim, yang kebanyakan dari Sulawesi Selatan.

Akibat kerusuhan itu terjadi pengungsian yang tertampung di berbagai tempat dan selanjutnya eksodus keluar. Kebanyakan pendatang dari Sulawesi Selatan kembali ke daerah asalnya. Hal ini menimbulkan kekacauan ekonomi, antara lain berupa kurangnya kebutuhan pokok dan tingginya harga-harga bahan kebutuhan. Krisis ekonomi yang dialami oleh masyarakat Kupang dapat dikatakan mencapai puncaknya. Untuk mengatasi hal ini Pemerintah NTT meminta kepada para eksodus untuk kembali dengan jaminan keamanan dari Pemerintah Daerah.

Adapun konflik keagamaan yang ada di Kab. Alor karena pelecehan Alqur'an yang dirasakan oleh umat Islam, tidak mengakibatkan kerusuhan yang memakan korban jiwa dan harta benda. Dampak positif dari konflik itu antara lain memperdalam kewaspadaan bagi semua pihak agar berhati-hati supaya tidak melakukan sesuatu yang bisa menyinggung umat lain.

D. Upaya-Upaya Pemeliharaan Kerukunan Hidup Masyarakat

Kasus kerusuhan Kupang ini termasuk kerusuhan yang dapat terselesaikan dengan segera. Sebab-sebab penyelesaian segera ini, adalah:

1. Peran para tokoh agama dalam meredam dan mencegah meluasnya kerusuhan; 2. Terjadinya kordinasi yag baik karena adanya hubungan baik antara pemerintah dengan majelis-majelis agama; 3. Penangan yang cepat dari pemerintah; 4. Sifat tawakkal dari pemuka Islam dalam menerima kejadian ini sebagai cobaan; 5. Pemahaman yang sama dalam menilai kerusuhan sebagai luapan kekecewaan terhadap berbagai kejadian sebelumnya di luar NTT; 6. Hubungan yang baik dan kondusif antara umat beragama sebelumnya; 7. Adanya forum-forum komunikasi yang terbentuk sebelumnya; dan 8. Ketidakseimbangan proporsi jumlah umat Kristiani dengan umat Islam (Mukhtar. 2003:125-126).

Upaya Pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam rehabilitasi, baik fisik maupun mental, meskipun ada yang menilai belum memuaskan, berperan dalam penyelesaian ini. Ketidakpuasan yang dirasakan terhadap pemerintah adalah ketidak mampuan menegakkan hukum terhadap pelanggaran pada kerusuhan itu. Hal ini menjadi trauma bagi pihak yang dirugikan yang berdampak ke depan.

Jaminan keamanan yang dijanjikan oleh pemerintah daerah belum dapat memulihkan tekanan psikologis bagi pendatang yang mengarah kepada tidak tertanamnya rasa/sikap memiliki daerah. Mereka tetap merasakan dirinya sebagai pendatang, yang berusaha mencari penghidupan yang baik. Mereka berusaha memenuhi kewajiban kenegaraannya, berusaha menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitarnya agar usahanya berjalan baik; namun hanya terbatas pada hal itu. Interaksi secara tuntas sulit terjadi.

Semua pihak telah merasakan derita dan kesulitan akibat kerusuhan itu. Untuk itu mereka mengharapkan agar tidak terulang peristiwa semacamnya. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat serta umat beragama. Di antara upaya-upaya yang dilakukan ialah: 1. Pembentukan Sekretariat Bersama Umat Beragama; 2. Perayaan syukuran bersama setiap tahunnya; 3. Kebersamaan dalam even-even keolahragaan; 4. Mendorong dan meningkatkan dialog-dialog umat beragama; 5. Menyiapkan materi-materi kerukunan pada setiap kegiatan yang memungkinkan; 6. Pemberian bantuan pembinaan institusi/majelis keagamaan; dan 7 meningkatkan intensitas bimbingan dan penyuluhan agama.

Upaya-upaya riel yang dilakukan oleh pemerintah dalam membina dan memelihara kerukunan hidup umat beragama yang menonjol antara lain menfalisilitasi dan meregulasi pertemuan dan dialog antar umat beragama. Bahkan Departemen Agama Provinsi NTT dan jajarannya

memilih program kerukunan sebagai salah satu fokus program utama. Hal ini terlihat pada visi yang dicetuskan berdasarkan kesepakatan internal. Yang pertama dicetuskan adalah Visi Kerukunan: NTT 2006 masyarakat rukun mengharum; kemudian disusul visi umum, yaitu; NTT 2010 masyarakat Agamis, Rukun Mengharum. Program dan pelaksanaannya merujuk pada visi dan misi tersebut.

Upaya lain yang dilakukan oleh Pemda, baik Provinsi NTT maupun kabupaten/ kota adalah diadakannya buka Puasa bersama bagi pemuka Islam setiap Ramadhan dengan mengundang kehadiran tokoh-tokoh agama lainnya bersama dengan pihak Pemda. Di samping itu juga mengadakan perayaan hari-hari besar keagamaan secara bersama.

Kerukunan hidup antar umat beragama (*out group*) erat kaitannya dengan pembinaan intern umat beragama (*in group*). Semua agama menghendaki kedamaian dan kerukunan hidup, yang berarti semua agama mengajarkan kepada umatnya untuk mengusahakan dan memelihara kehidupan rukun dan damai itu. Pembinaan internal yang berarti sosialisasi ajaran agama yang benar mempengaruhi kerukunan hidup. Sosialisasi ajaran agama ini menjadi perhatian besar baik di kalangan umat beragama itu sendiri maupun pemerintah. Dalam berbagai kesempatan yang memungkinkan, bahkan dalam khotbah-khotbah kerukunan hidup mendapatkan forsi tertentu dari para pengkhotbah.

Begitu pentingnya pembinaan internal ini, Pemerintah Kota Kupang, memprogramkan pembinaan keagamaan bagi pegawai-pegawai negeri dengan pertemuan rutin yang diisi dengan pengajian/penyuluhan agama bagi masing-masing umat beragama. Pemda memfasilitasi dan mengkordinir pertemuan ini.

Kerjasama antar kelompok masyarakat yang berbeda agama yang berpotensi untuk memelihara kerukunan ini terjadi di kalangan masyarakat NTT sejak dahulu. Kerjasama ini bukan hanya di bidang ekonomi dan sosial, tetapi juga di bidang keagamaan. Partisipasi masyarakat lain agama sering terjadi pada pelaksanaan upacara-upacara keagamaan yang bersifat seremonial. Demikian pula partisipasi pemerintah dalam upacara-upacara demikian ini tanpa membedakan agama. Dalam pelaksanaan STQ misalnya, Pemerintah Daerah, yang notabene personelnnya kebanyakan beragama non-Islam terlibat langsung sebagai panitia, bahkan melibatkan pihak umat lain, misalnya dalam soal keamanan bahkan pembiayaan.

Hubungan-hubungan sosial yang baik dalam masyarakat yang berbeda agama baik berkaitan dengan pola pertetanggaan maupun hubungan

ekonomi sangat menunjang kerukunan hidup antar umat beragama. Mereka berusaha memelihara dengan baik kedamaian dan kerukunan itu, dan menerima dengan baik pula perbedaan itu. Mereka tidak merasakan gangguan bila diadakan upacara keagamaan oleh tetangganya yang berbeda agama.

Pada kerusuhan 30 September 1998 tampak dengan jelas peranan hubungan baik tersebut dalam memelihara keselamatan tetangga atau mitranya. Harta benda para pendatang bahkan umat Islam yang menjadi sasaran amukan dapat terelamatkan karena pembelaan pihak non muslim yang mempunyai hubungan dan kemitraan yang baik. Ketika para pemuda yang pada pagi hari diminta untuk ikut dan pergi mengendarai truk-truk kemudian kembali ke tempat mereka masing-masing mendapatkan kampung mereka yang telah porak poranda, mereka menyatakan kekecewaan dan penyesalan mereka mengapa mereka pergi dan tidak menjaga tempat mereka sendiri (Muchtar.2003:130)

Pengalaman ini menjadi pelajaran bagi para pendatang yang berusaha mencari rezeki di NTT untuk memelihara kemitraan kerja dengan penduduk asli, baik dengan pempekerjakannya bila masih membutuhkan tenaga kerja, atau dengan menyewa tempat mereka untuk kebutuhan usahanya. Upaya seperti ini dirasakan oleh para pedagang pendatang dapat membentengi usahanya dari kehancuran bila terjadi kerusuhan.

Penerimaan siswa atau mahasiswa yang berbeda agama pada sekolah yang dibina oleh umat beragama tertentu menunjang terbinanya kerukunan hidup beragama. Pada UMK misalnya, lebih separuh mahasiswanya non Muslim. Mereka bersama-sama dan berbaur dalam mengikuti perkuliahan. Namun untuk mata kuliah pendidikan agama, masing-masing umat beragama mendapatkan materi kuliah agamanya dari dosen tef sendiri.

Semua yang telah dikemukakan merupakan faktor penunjang dari pembinaan kerukunan beragama di NTT. Selain faktor penunjang ini terdapat juga faktor-faktor kendala. Faktor kendala umum, sebagaimana pada program-program lainnya, adalah kurang tersedianya dana yang cukup. Berbagai macam kegiatan atau program yang dinilai baik untuk memelihara kerukunan ini tidak dapat dilaksanakan karena faktor dana ini. Kondisi sosial ekonomi dan keterbelakangan pendidikan secara umum merupakan kendala lainnya yang perlu mendapat perhatian.

Hambatan sosial yang tidak kurang pentingnya adalah masih kentalnya istilah penduduk asli (putra daerah) dan pendatang. Hal ini semakin

akibatnya lebih besar bahkan mengerikan dan dapat berlangsung dalam waktu yang lama. Dalam konflik agama, pelaksanaannya bisa sangat destruktif dan tidak mengenal belas kasihan karena pelakunya merasa melakukan hal itu bukan untuk kepentingan diri mereka sendiri, melainkan sesuatu tujuan abstrak yang dipandang lebih tinggi dan mulia. Konflik di Kota Kupang meskipun bernuansa agama, tetapi bukan konflik agama. Konflik ini bersifat instrumental, dikarenakan ketidakpuasan terhadap kebijakan Nasional dalam penyelesaian berbagai masalah, bukan karena kebencian terhadap kelompok agama lain (Islam).

Jika elemen-elemen konflik kerusuhan Kupang tersebut dilihat berdasarkan keempat elemen konflik menurut Tomagola sebagaimana yang dikemukakan oleh Mudzhar, jelas bukan konflik agama. Menurutny, suatu konflik sosial biasanya terjadi karena bertemunya empat elemen utama dalam waktu yang bersamaan. Keempat elemen itu ialah: konteks pendukung, akar konflik, sumbu, dan pemicu. Kehidupan masyarakat di Kota Kupang yang memperlihatkan batas-batas kultural dan agama di tengah-tengah masyarakat merupakan konteks pendukung. Kehidupan sosial ekonomi yang memperlihatkan kesenjangan antara penduduk asli dan pendatang, di mana penduduk asli berada pada ekonomi marginal merupakan akar konflik. Ketidakpuasan terhadap kebijakan Pemerintah, baik dalam kebijakan programnya maupun penyelesaian berbagai masalah nasional merupakan sumbu konflik. Dan pemicunya adalah kondisi perkabungan yang tidak terkontrol dan tidak terkoordinasi karena provokasi.

Meskipun demikian, faktor perbedaan agama dilibatkan dalam konflik tersebut. Hal ini terlihat bahwa yang menjadi sasaran amuk massa adalah simbol-simbol agama (Islam) dan harta benda umat Muslim, terutama pendatang. Oleh karena yang melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap aset-aset tersebut adalah kelompok yang berbeda agama, maka sementara orang memandang hal itu sebagai konflik agama. Mereka yang berpandangan demikian, tidak menerima bahwa kerusuhan itu dikarenakan kesenjangan dan kecemburuan sosial akibat ketimpangan di bidang ekonomi. Mereka beralasan bahwa jika kerusuhan itu karena faktor tersebut, mengapa bukan orang-orang Cina yang menjadi sasaran amukan, padahal merekalah yang paling menguasai perekonomian Kota Kupang.

Dengan demikian, kerusuhan di Kota Kupang sesuai dengan pandangan yang mengatakan bahwa: Pada zaman modern, konflik-konflik sosial atau komunal yang terjadi tidak disebut sebagai konflik agama dengan alasan konflik itu tidak dilakukan atas dasar perbedaan agama. Tetapi itu

tidak berarti bahwa unsur-unsur agama tidak dilibatkan dalam konflik-konflik tersebut (Isre, 2003:7)

Perbedaan agama merupakan salah satu elemen konflik, akan tetapi tidak berdiri sendiri, dan bukan juga sebagai pemicu karena semua pemeluk agama menerima perbedaan agama itu sebagai suatu realitas sosial. Persamaan agama merupakan suatu ikatan yang menyebabkan terjadinya istilah "kita" (*in group*) dan "mereka" (*out group*). Terhindarnya orang-orang Cina dari amukan massal tersebut kemungkinan disebabkan karena faktor "kita", sebaliknya adanya harta benda umat Islam menjadi sasaran amukan diduga karena faktor "mereka" itu.

Kerusuhan 30 Nopember 1998 di Kota Kupang tersebut, meskipun menimbulkan korban harta benda yang tidak sedikit, sebagaimana telah dikemukakan, namun tidak menimbulkan korban jiwa. Sasaran amukan bukan jiwa manusia (pembunuhan), tetapi hanya harta benda. Hal ini menunjukkan pula bahwa hal itu terjadi bukan karena konflik agama.

Disadari bahwa di dalam masyarakat selalu ada usaha untuk menjalin kerjasama antara kelompok-kelompok yang ada demi terpeliharanya keseimbangan, namun pada saat yang sama juga selalu ada kelompok-kelompok masyarakat yang saling bertentangan. Acapkali pertentangan antara komunitas tersebut tidak bisa diselesaikan sendiri oleh mereka. Perlu kelompok dominan untuk menekankan konsensus-konsensus antara mereka. Karena teori konflik memandang bahwa konsensus sesungguhnya merupakan rekayasa kelompok dominan untuk memaksakan kepentingan mereka. Oleh karenanya konsensus hanyalah khayalan nilai-nilai yang dipersepsikan benar oleh kelas-kelas dominan (Puslitbang, 2003: 10).

Tampilnya pemerintah sebagai kelompok dominan, bukan berpihak pada salah satu kelompok yang bertikai, tetapi sebagai pihak ketiga yang berusaha mengakomodir kedua kelompok itu. Pihak dominan ini berusaha menyelesaikan pertikaian ini secara damai dan menguntungkan kedua belah pihak, setidaknya tidak hanya merugikan sepihak saja. Dengan kata lain memakai perspektif konflik, sebagaimana yang telah dikemukakan Muhaimin, menekankan pada cara penyelesaian melalui prosedur rasional dalam "meja penyelesaian bersama" sebagai sarana negosiasi yang wajar antara berbagai kelompok atau golongan (Isre, 2003: viii)

Berbagai usaha yang telah dilakukan masyarakat dan Pemerintah Daerah sebelum kerusuhan 30 Nopember 1998. Pertemuan-pertemuan antara pemimpin-pemimpin agama, baik pada forum dialog, seminar atau pertemuan-pertemuan lainnya, bertujuan untuk memelihara kerukunan hidup

antar umat beragama. Interaksi sosial antar anggota masyarakat yang berbeda etnik dan agama berjalan dengan baik, baik dalam hidup pertetanggaan ataupun dalam hubungan kemitraan.

Upaya-upaya tersebut tidak mampu mencegah terjadinya kerusuhan 30 Nopember 1998. Akan tetapi tidak dapat dikatakan bahwa upaya-upaya itu tidak bermanfaat sama sekali. Penyelesaian yang cepat dan tidak meluasnya eskalasi konflik yang dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar adalah karena upaya-upaya tersebut. Mukhtar mengemukakan sebab-sebab terselesainya kerusuhan itu dengan segera, diantaranya sebagai berikut: 1. Peran para tokoh agama sangat besar dalam meredam tidak meluasnya kerusuhan ke wilayah-wilayah lain; 2. Hubungan baik selama ini antara majelis-majelis agama dengan pemerintah daerah sehingga kerjasama atau koordinasi antarannya dapat segera dilakukan untuk meredam konflik; 3. Penanganan masalah oleh pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Kepala Daerah NTT beserta jajarannya sangat cepat; 4 Sifat tawadhu dan sabar yang ditunjukkan para pemuka agama Islam, dalam hal ini MUI NTT, menerima musibah sebagai cobaan dan peringatan dari Yang Maha Kuasa Allah SWT. dan menolak tawaran bantuan fisik dari Umat Islam di luar NTT untuk membalas; 5. Kesamaan pendapat para pemuka agama dan pemerintah bahwa kerusuhan terjadi akibat dari kekecewaan umat Kristiani terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di luar NTT, yang tidak tertangani dengan tuntas oleh pemerintah pusat dan bukan karena gesekan hubungan antar umat beragama di NTT; 6. Hubungan antar umat beragama sebelum terjadinya kerusuhan sangat kondusif dan tidak pernah terjadi hal-hal yang sampai merusak hubungan baik selama ini dan terbukti tidak terjadi penurunan setelah kerusuhan, bahkan semakin kondusif; 7 Adanya forum-forum komunikasi antar umat beragama yang dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat; dan 8. Ketidakseimbangan jumlah umat Kristiani dan Islam di wilayah Kupang khususnya dan Provinsi NTT umumnya (Mukhtar.2003:125:126)

Kondisi umat Islam yang minoritas menempatkannya pada posisi yang lemah, sehingga meskipun secara terpaksa menerima solusi penyelesaian yang ditawarkan pihak pemerintah sebagai pihak yang dominan. Di antara dominasi yang dipertunjukkan oleh pemerintah adalah kesiapan memberikan kompensasi kerugian, meskipun terbatas. Disamping itu, Pemerintah akan memberikan jaminan keamanan kepada para korban kerusuhan.

Penyelesaian yang terjadi terhadap kerusuhan Kupang itu, meskipun telah diakomodir dengan baik tetapi menyisakan dampak-dampak yang masih perlu diselesaikan. Penyelesaian itu dirasakan oleh umat Islam bukan jaminan untuk tidak terulangnya kembali peristiwa yang serupa. Karena itu secara psikologis, ancaman-ancaman tidak hilang sama sekali.

Untuk membina dan memelihara kerukunan itu perlu upaya-upaya integrasi masyarakat dari kedua pihak yang pernah berkonflik. Kondisi integrasi masyarakat sampai saat ini berada pada taraf akomodasi. Menurut Susanto, integrasi sebagai proses melalui beberapa fase, yaitu: a. akomodasi, b. kerjasama, c. koordinasi, dan d. asimilasi. Selanjutnya dikatakan, Proses asimilasi bukan merupakan proses searah atau sepihak, melainkan merupakan suatu proses dua arah (*two way process*) karena menyangkut pihak yang diintegrasikan dan kelompok/anggota-anggota lain yang mengintegrasikan diri (Susanto: 119).

Identitas kelompok yang merupakan perekat tetap penting untuk dipelihara tetapi dalam berinteraksi dengan kelompok lain perlu juga adanya sikap toleransi, karena jika identitas kelompok itu diaktifkan tanpa diimbangi sikap toleransi kerenggangan dalam masyarakat akan semakin melebar. Dalam interaksi antara penganut agama yang berbeda, jika masing-masing penganut agama tersebut mengaktifkan identitas kelompok masing-masing, maka hubungan atau interaksi antara penganut agama tersebut akan menjadi renggang yang akan mengganggu kerukunan hidup antara umat beragama masyarakat yang bersangkutan. Sebaliknya, jika dalam interaksi antara penganut agama yang berbeda-beda tersebut masing-masing pihak menyimpan identitas masing-masing akan terjadi hubungan yang harmonis atau timbul hubungan hidup umat beragama

B. Kerukunan Hidup dalam Harapan dan Tantangan.

Kerukunan hidup merupakan dambaan setiap masyarakat dan merupakan harapan setiap agama. Tetapi hal ini tidak selamanya akan terjadi oleh karena dalam masyarakat itu sendiri terdapat potensi-potensi konflik, kemajemukan masyarakat adalah salah satu faktor. Kemajemukan yang merupakan realitas sosial dalam masyarakat NTT perlu dikemas dengan baik oleh semua pihak agar konflik yang ada dapat terakomodir sebelum berkembang menjadi permusuhan.

Orang-orang bijak berkata, 'sejarah adalah guru yang baik'. Sejarah atau peristiwa masa lalu perlu dijadikan rujukan untuk menata masa depan. Peristiwa kerusuhan yang terjadi pada tanggal 30 Nopember 1998 di Kota

Kupang telah menimbulkan kerugian yang besar, baik dari segi material maupun dari segi psikologis. Banyak pelajaran yang dapat diambil oleh masyarakat Kota Kupang khususnya dan masyarakat NTT pada umumnya dari peristiwa ini.

Upaya-upaya Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam meningkatkan tarap hidup masyarakat sudah memperlihatkan keberhasilan-keberhasilan, meskipun belum memenuhi harapan semua pihak karena berbagai kendala. Terjadinya perbaikan kehidupan masyarakat merupakan salah satu elemen konflik dapat teratasi.

Perhatian pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah terhadap masalah kerukunan hidup umat beragama sangat tinggi. Pemerintah Daerah Provinsi NTT menyusun dan melaksanakan berbagai program untuk merangsang masyarakat untuk memelihara kerukunan mereka. Upaya-upaya kerukunan diharapkan muncul dari masyarakat atau umat beragama itu sendiri, pemerintah hanya memposisikan diri sebagai fasilitator dan regulator. Pembentukan sekretariat bersama para pemuka setiap kelompok agama yang difasilitasi oleh pemerintah merupakan salah satu langkah tepat untuk menjalin kerjasama yang baik. Keakraban yang diperlihatkan oleh para tokoh agama dapat berdampak positif terhadap hubungan dan interaksi umat beragama. Efektifitas dan keaktifan forum ini dapat mendukung terpeliharanya kerukunan hidup umat beragama. Volume perjumpaan perlu ditingkatkan dan program kerjasama lebih terarah untuk menata masa depan.

Kerjasama antar umat beragama demikian masih terbatas pada tingkat elit agama, perlu tersosialisasikan kepada level di bawahnya, yaitu level menengah karena level ini tidak kurang pentingnya dari level atas. Permasalahan kerukunan pada level bawah (akar rumput) tidak akan timbul bila tidak dirangsang oleh level di atasnya. Sosialisasi ajaran agama yang menghendaki kedamaian dan ketenteraman ditingkatkan melalui berbagai kesempatan yang memungkinkan. Pemahaman yang baik terhadap ajaran agama masing-masing dapat menjamin terpeliharanya kerukunan itu dan mengeleminasi konflik.

Peningkatan upaya dan pelaksanaan program kerukunan baik bagi pemerintah maupun masyarakat senantiasa terbentur pada masalah dana, karena setiap kegiatan dan program membutuhkan dana. Keterbatasan dana yang dialami saat ini menyebabkan keterbatasan kegiatan dan program.

Kerukunan hidup berkaitan erat dengan integrasi masyarakat. Proses integrasi yang saat ini pada taraf akomodasi perlu usaha peningkatan, meskipun untuk sampai pada taraf asimilasi sangat sulit karena tantangan

agama dan kultural. Dampak psikologis yang negatif dari kerusuhan 30 November 1998 bagi para pendatang yang pada umumnya beragama Islam perlu dieleminir. Mereka senantiasa merasa sebagai pendatang, dan tidak punya rasa memiliki. Mereka masih merasakan rasa kekhawatiran dan belum lepas dari kecurigaan. Akibatnya, aspirasi pembangunan bagi mereka sangat lemah.

Potensi-potensi konflik antar umat beragama, seperti pendirian rumah ibadah, perkawinan antar agama, pendidikan agama, penyebaran agama dapat teredam sehingga tidak menimbulkan ekses negatif. Demikian pula kegiatan-kegiatan keagamaan bagi agama lain dapat ditolerir dengan baik. Selain itu pemahaman terhadap hal-hal yang sangat dihormati penganut agama lain cukup baik sehingga terdorong untuk menjaganya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kerusuhan 30 Nopember 1998 mengganggu kerukunan hidup umat beragama di Kota Kupang, khususnya dan **NTT** pada umumnya, yang sebelumnya terbina dengan baik. Pada satu sisi menimbulkan dampak psikologis yang negatif bagi umat Islam, terutama para pendatang. Dampak psikologis ini masih memerlukan penanganan yang baik. Namun pada sisi lain, menimbulkan usaha-usaha perbaikan yang hasilnya memperlihatkan terpelihara dan terbinanya kerukunan itu. Hanya saja proses integrasi yang menunjang kerukunan masih pada taraf akomodasi.

Keberhasilan pembangunan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta peningkatan kerjasama antar umat beragama dalam berbagai bidang sangat menunjang pembinaan dan peningkatan kerukunan hidup umat beragama. Kondisi yang kondusif bagi kehidupan beragama secara nasional yang tercipta merupakan faktor penunjang lainnya.

Kendala utama dalam upaya peningkatan kegiatan dan program kerja kerukunan adalah masalah dana. Kendala lainnya dalam proses integrasi masyarakat ialah bersifat psikologis dan kultural.

B. Saran

1. Kecemburuan sosial berpotensi menimbulkan konflik bahkan perselisihan, karena itu perlu diredam dengan menciptakan rasa keadilan pada berbagai bidang dan level. Timbulnya perasaan ketidakadilan terkadang karena kurang pemahaman, karena itu sosialisasi sangat diperlukan.
2. Forum kerjasama antar umat beragama perlu ditingkatkan, baik volume kegiatannya dengan penyusunan program rutin, maupun jangkauannya. Untuk itu, penyiapan dana yang cukup sangat diperlukan.
3. Komitmen terhadap kebersamaan antar umat beragama selama ini masih cenderung verbal dan seremonial. Karena itu diperlukan keikhlasan dari semua pihak. Istilah putra daerah dan pendatang ditolerir dengan dedikasi dan profesionalitas sehingga tidak terasa adanya diskriminasi. Hal ini dapat menghilangkan beban psikologis bagi para pendatang dan menumbuhkan rasa memiliki daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1992. *Profil Provinsi Republik Indonesia, Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara.
- Azra, Azyumardi (ed.) 1998. *Agama, Keragaman Etnik di Indonesia*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama.
- Badan Pusat Statistik Kota Kupang. 2003. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Kupang 2003*.
- 2003. *Kota Kupang dalam Angka 2003*.
- Isre, Moh.Saleh (ed). 2003. *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.
- Liliweri, Alo dan Gregor Neonbasu. 1995. *Perspektif Pembangunan, Dinamika dan Tantangan Pembangunan Nusa Tenggara Timur*. Cetakan II. Kupang: Ppenerbit Yayasan Citra Insan Pembaru.

- Muchtar, Ibnu Hasan. 2003. *Konflik-Konflik Sosial Bernuansa Agama, Studi Kasus Kerusuhan Kupang, Nusa Tenggara Timur 30 Nopember 1998*. Dalam *Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI
- Netti, A.G.Hadzamarwit dan Hands Itta. 1997. *Kupang dari Masa ke Masa*. Kupang: Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang.
- Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan. 2003a. *Riuh di Beranda Satu, Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*
- 2003b. *Konflik Sosial bernuansa Agama di Indonesia*.
- Pusat Pengembangan Madrasah.(PPM). 2003. *Profil Madrasah dan Pesantren*. Kupang: Kanwil Dep. Agama Prov.NTT.
- Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Nusatenggara Timur*.
- Saifuddin. Achmad Fedyani. 1986. *Konflik dan Integrasi, Perbedaan Faham dalam Agama Islam*. Jakarta: CV.Rajawali.
- Soemardjan, Selo dan Soelaeman Soemardri. 1974. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Sudjangi. 1993. *Kajian Agama dan Masyarakat, Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama.
- Sudjangi. 2003. *Pluralitas Sosial, Hubungan antar Kelompok Agama dan Kerukunan*. Dalam *Harmoni. Pengembangan Wawasan Multi Kultural*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI
- Susanto. Astrid. 1985. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Cetakan kelima.. Bina Cipta.
- Widiyatmika, Munandjar. 1995. *Integrasi Nasional Suatu Pendekatan Budaya di Nusa Tenggara Timur*. Kupang: FKIP Universitas Nusa Cendana.